

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2019-2021**



Oleh

NURHAYANA

C0218029

**PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

ABSTRAK

NURHAYANA, 2023. Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021. Dibimbing oleh Enny Radjab, dan Sufyan Amirullah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perealisasi anggaran belanja, kinerja anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasangkayu tahun 2019-2021. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja. Perealisasi anggaran belanja dapat dilihat dari hasil analisis varians belanja dimana perealisasi anggaran pertahun menggambarkan serapan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasangkayu telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Analisis pertumbuhan belanja menunjukkan adanya pertumbuhan belanja dari tahun 2019-2020 sebanyak Rp. 8.931.457.124,- atau sebesar 58,12%, tahun 2020-2021 sebanyak Rp. 19.363.407.274,- atau sebesar 79,77%. Analisis keserasian belanja menunjukkan aktivitas belanja pada tahun 2019-2021 sebagian besar dana belanja dialokasikan untuk belanja modal dan hanya beberapa persen untuk belanja operasi. Dan untuk mengetahui kinerja anggaran belanja dengan menggunakan rasio efisiensi dapat dikatakan bahwa kinerja anggaran belanja kurang efisien dikarenakan persentase rata-rata yang berada pada 95,92% maka dapat dikatakan bahwa kinerja anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasangkayu tahun 2019-2021 yaitu kurang efisiensi karena persentasinya lebih dari 90%.

Kata Kunci : Kinerja, Anggaran, Belanja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktifitas jasa yang terdiri mencatat, mengklarifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan yang di terapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, suatu organisasi yang bergerak di sektor publik maupun privat, harus memperbaiki kinerja organisasinya melalui peningkatan kinerja pegawai baik secara individual dan kelompok. Dengan kinerja yang baik, setiap pelaksanaan tugas di dalam organisasi dapat diselesaikan dengan penggunaan waktu, tenaga, dana dan sumber-sumber lainnya secara efisien dan efektif.

Pada organisasi publik, penilaian kinerja sangatlah penting untuk dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penilaian kinerja tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja sebuah organisasi publik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, karena pada dasarnya orientasi organisasi publik bukan untuk mencari laba (*profit oriented*), tetapi lebih mengutamakan pelayanan publik (*service public oriented*). Selain itu penilaian kinerja pada organisasi publik digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja

pada periode yang lalu, untuk digunakan sebagai dasar penyusunan strategi organisasi selanjutnya.

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi, organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting, untuk evaluasi dan perencanaan masa depan. Beberapa jenis informasi yang digunakan dalam pengendalian disiapkan dalam rangka menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian pengukuran kinerja tidak hanya informasi finansial tetapi juga informasi nonfinansial.

Dalam pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintahan mengenai kegiatan atau program yang telah dilaksanakan tolak ukur program yang telah dibuat (standar nomina pelayanan publik) atau berdasarkan basis regular dan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran. Ciri utama dalam pengelolaan anggaran yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi yang merupakan perwujudan pemerintahan yang baik (*good goverment*) oleh karena itu anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Tercapainya anggaran yang baik tidak terlepas dari pengawasan dalam penyusunan maupun penggunaan anggaran. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Terutama dalam penggunaan belanja, khususnya belanja langsung sering terjadi penggunaan anggaran yang tidak sesuai sehingga tujuan tidak tercapai

secara ekonomis, efisien dan efektif yang manfaat atau output dari pelayanan publik sulit dirasakan oleh masyarakat.

Pengelolaan anggaran yang baik merupakan prinsip *value for money* dan mutlak dilakukan. Implementasi prinsip *value for money* diyakini dapat memperbaiki kinerja. *Value for money* merupakan prinsip pengelolaan anggaran sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan hasil artikulasi dari perumusan hasil strategi yang telah dibuat. Tahap penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja satuan moneter (Viggeland N, 2015).

Rancangan anggaran pendapatan belanja dan negara (RAPBN) 2016 pemerintah melakukan reformasi dibidang anggaran baik disisi belanja, pendapatan maupun pembiayaan (Syamsuddin, dkk, 2022) reformasi ini ditertapkan untuk mengubah anggaran-anggaran yang tidak produktif dan tepat sasaran kearah yang lebih tepat dan efisien penggunaannya. Reformasi keuangan negara bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, kualitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara yang berorientasi untuk kemakmuran rakyat

(Abubakar dkk, 2021). Reformasi keuangan negara ditandai dengan disahkannya tiga undang-undang (UU) dalam bidang keuangan negara yakni: UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) tersebut, pembaca laporan dapat membuat hasil analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis belanja, analisis pendapatan, serta analisis pembiayaan (Rabiyah dkk, 2021). Anggaran memiliki peran penting dalam penyelenggaraan semua aktivitas pemerintahan dan sebagai alat perencanaan, stabilisasi, distribusi, pengelolaan sumber daya, pengendalian organisasi, serta penilain kinerja (Karim dkk, 2019). Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efisiensi dan efektifitas suatu belanja operasi dengan membandingkan anggaran dengan hasil real (realisasi terkini) yang telah dicapai. Berdasarkan permenkua 225/PMK.05/2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintahan pusat kebijakan akuntansi beban, belanja dan transfer (Dindayani, 2020).

Definisi belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara dalam periode tahun anggaran belanja yang mengurangi saldo anggaran lebih (SAL) dan pemerintahan tidak akan memperoleh pembayaran kembali. Belanja negara merupakan salah satu titik strategi penyelenggaraan pemerintahan (Maddatung dkk, 2021). Proses belanja harus dilakukan secara terkendali oleh karena itu mekanisme belanja harus disusun seefisien dan seefektif mungkin.

Auditor pemerintahan lebih memperhatikan pada audit atas belanja, karena sebagian besar kebocoran APBN terjadi dalam pelaksanaan belanja. Kebocoran tersebut disebabkan karena adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) maupun karena kurangnya pemahaman penyelenggaraan negara dalam melakukan proses belanja (Karim dkk, 2021). Klasifikasi belanja pada komisi pemilihan umum yaitu belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti yang berdasarkan perbandingan anggaran dan realisasi belanja menunjukkan adanya kelemahan yang terjadi selisih antara target dengan realisasi, dan adanya pelaksanaan anggaran yang tidak efektif dan efisien pada tahun berjalan di KPU Kabupaten Pasangkayu. Penyebabnya karena adanya pengeluaran belanja atau adanya penetapan standar pasar yang melebihi nilai pasar dan hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja instansi. Berikut laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2019-2021.

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	15.565.024.000	15.345.234.082
2020	26.911.832.000	24.273.693.206
2021	4.960.285.000	4.910.285.932

Sumber : KPU Kabupaten Pasangkayu

Berdasarkan laporan analisis anggaran belanja komisi pemilihan umum kabupaten pasangkayu pada periode 2019-2021 anggaran yang diterapkan

mengalami kenaikan dan penurunan begitu juga dengan realisasi belanjanya. Pada tahun 2019 dengan anggaran Rp. 15.565.024.000 perealisasiannya sebesar Rp.15.345.234.082. Pada tahun 2020 anggaran tahunnya sebesar Rp. 26.911.832.000 terealisasi Rp. 24.273.693.206 ini berarti mengalami kenaikan dari tahun 2019. Anggaran yang diterapkan pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar Rp. 4.960.285.000 terealisasi Rp. 4.910.285.932.

Selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan tersebut telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran, sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran disebabkan karena adanya program kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal sudah diamanatkan dalam anggaran, oleh karena itu perlu dilakukan analisis yang akurat dalam anggaran. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai kinerja anggaran belanja KPU Kabupaten Pasangkayu.

Analisis pada belanja sangatlah penting untuk dilakukan karena belanja merupakan aktifitas rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah dan belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*public fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Karena mengingat sifat belanja relatif mudah dilakukan dan rentang akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan pengendalian dan pengawasan terhadap belanja

sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menemukan suatu masalah yang terdapat di komisi pemilihan umum dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perealisasi anggaran belanja yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tahun 2019-2021?
2. Bagaimana kinerja realisasi anggaran belanja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perealisasi anggaran belanja yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu 2019-2021.
2. Untuk mengetahui kinerja realisasi anggaran belanja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu 2019-2021.

1.4 Manfaat Peneliti

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah referensi dan wawasan bagi pengembangan ilmu khususnya dalam ilmu akuntansi, sekaligus sebagai bahan informasi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang mekanisme kinerja anggaran belanja pada komisi pemilihan umum. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan alternative dan masukan dalam pelaksanaan kinerja anggaran belanja pada komisi pemilihan umum kabupaten pasangkayu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki pengertian yang beragam dikarenakan dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Wiratna (2015) akuntansi sektor publik dapat di definisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya.

Pengertian lain dari akuntansi sektor publik proses pencatatan, pengklarifikasian, penganalisisan dan pelaporan keuangan yang diterapkan di lembaga-lembaga negara dan departemen-departemen dibawahnya untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah yang berguna untuk pengambilan keputusan (Pratiwi, 2013). Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2018: 3) bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi

atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pihak-pihak yang memerlukan.

2.1.2 Kinerja Instansi Pemerintahan

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 tahun 2006). Kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi *input* atau *output* tetapi juga dari sisi *outcome*, manfaat dan dampaknya terdapat kesejahteraan masyarakat.

Kinerja pemerintah daerah dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selanjutnya disebut EKPPD. EKPPD merupakan penilaian kinerja berdasarkan LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), informasi keuangan daerah dan laporan-laporan lainnya yang dibuat oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah (Permendagri Nomor 73 Tahun 2009).

Disamping penilaian terhadap kinerja pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dicapainya. Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan disebut akuntabilitas kinerja.

Instansi pemerintah berpedoman pada tujuan rencana kerja pemerintah (RKP) yang selalu berkaitan dengan kinerja anggaran yang terdapat dalam laporan keuangan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk membantu pengambil keputusan dalam membantu dan memperbaiki kinerja serta berfokus pada tujuan instansi dan untuk menilai akuntabilitas instansi bahwa anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis serta memberikan pelayanan yang lebih baik.

Pengukuran kinerja adalah cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah (Ulum, 2012). Pengukuran dilakukan dengan menggunakan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Hal ini diperlukan untuk memastikan tercapainya pengeluaran yang tidak melebihi anggaran dan kegiatan yang direncanakan telah mencapai sasaran. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

2.1.2.1 Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah

ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri pertimbangan pencapaian strateginya.
3. Sebagai alat untuk mencapai keputusan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

1. Untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunitas kelembagaan.

2.1.2.2. Manfaat Pengukuran Kinerja

Mahsun (2016: 33) manfaat pengukuran kinerja antara lain:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerjanya.
3. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Dan memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.1.2.3 Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja diwujudkan dalam bentuk laporan. Terdapat perbedaan nama antara peraturan dalam permenpan RB No. 29 Tahun 2006. Permenpan dan RB No. 29 Tahun 2010 menamakan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP). Laporan kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam pencapaian tujuan/sasaran strategi instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan atas pencapaian kinerja, dan perbandingan pencapaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan.

2.1.2.4 Penilaian Kinerja

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 108 Tahun 2000 penjelasan pada pasal 5 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah, penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra didasarkan pada indikator:

1. Dampak, bagaimana dampaknya terhadap kondisi yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
2. Manfaat, bagaimana tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambahan bagi masyarakat, maupun pemerintah.
3. Hasil, bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) kebijakan atau program yang sudah dihasilkan.
4. Keluaran, bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
5. Masukan, bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

Selain itu, menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang laporan keuangan pemerintah pusat, daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara

jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Pada keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintah. Ketentuan yang dicakup dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja terpadu.

2.1.3. Pengertian Anggaran Belanja

Secara umum anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk suatu masa periode dimasa yang akan datang. Dalam pengertian anggaran secara umum itu, anggaran negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode dimasa yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang terjadi dimasa lalu.

Definisi belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara dalam periode tahun anggaran belanja yang mengurangi saldo anggaran lebih (SAL) dan pemerintahan tidak akan memperoleh pembayaran kembali. Belanja negara merupakan salah satu titik strategi penyelenggaraan pemerintahan (Maddatung dkk, 2021). Proses belanja harus dilakukan secara terkendali oleh karena itu mekanisme belanja harus disusun seefisien dan seefektif mungkin

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan: “anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode”.

Munandar (2021) menyatakan, anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Narifin (2012 : 19) mengatakan anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.

Halim dan Kusufi (2014 : 48) Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Sasongko dan Parulian (2015 : 2) anggaran merupakan suatu rencana yang akan dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif. Dari definisi diatas dapat disimpulkan, anggaran adalah suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dilakukan secara sistematis dan formal untuk mencapai tujuan dan dilakukan melalui koordinasi dan kontrol tanggung jawab manajemen.

Terdapat berbagai jenis anggaran belanja, yakni anggaran belanja penjualan, anggaran belanja produksi, anggaran belanja tunai, anggaran belanja

pemasaran, anggaran belanja proyek, anggaran belanja pendapatan, dan anggaran belanja ekspeditur.

2.1.3.1 Tujuan Anggaran Adalah:

1. Menyediakan perkiraan pendapatan dan ekspeditur, yakni membangun model.
2. Bagaimana bisnis dapat berjalan secara finansial jika menjalankan strategi, peristiwa, dan rencana tertentu.
3. Memungkinkan operasi keuangan bisnis yang sebenarnya untuk diukur terhadap perkiraan.

Pengertian Anggaran Menurut Halim (2016:48), “anggaran belanja merupakan catatan yang memuat proporsi pelaksanaan, baik pembayaran maupun penggunaan, yang diketahui dengan istilah uang tunai yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan memasukkan informasi sebelumnya sebagai jenis evaluasi kontrol dan eksekusi”. Sedangkan menurut Sasongko (2015:2) “mengatakan anggaran adalah rencana kerja yang sengaja disusun dan disampaikan dalam satuan kas pada jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya”. Rencana keuangan dalam organisasi pemerintah adalah dasar dari pelaksanaan semua latihan administrasi.

2.1.3.2 Manfaat Anggaran

Nafarin (2019), anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain :

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
2. Dapat dipergunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.

3. Dapat memotivasi pegawai.
4. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai.
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

2.1.3.3 Fungsi Anggaran

Nafarin (2019) menyatakan, fungsi anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu :

1. Sebagai pedoman kerja anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan - kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang.
2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian - bagian yang terdapat dalam perusahaan menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju kesasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin.
3. Sebagai alat pengawasan kerja anggaran berfungsi juga sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan apa yang tertuang didalam anggaran dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapat dinilai apakah telah sukses bekerja atau kurang.

Di lain pihak menurut Nafarin (2019), fungsi anggaran terdiri dari enam item yaitu :

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses rencana kerja
2. Anggaran merupakan cetak biru aktifitas yang akan dilaksanakan perusahaan dimasa yang akan datang.
3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang berhubungan yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer atas dan manajer bawah.
4. Anggaran berfungsi sebagai alat tolak ukur yang dipakai sebagai pembandingan hasil operasi sesungguhnya.
5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.
6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

Nafarin (2019), mengatakan bahwa fungsi anggaran terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk lebih jelasnya diberikan gambaran sebagai berikut :

1. Fungsi perencanaan Anggaran merupakan alat perencanaan juga harus memerhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran yang lain.
2. Fungsi pelaksanaan Anggaran merupakan pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang (terutama dalam hal keuangan). Jadi anggaran bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan (laba).

3. Fungsi pengawasan Anggaran merupakan alat pengawasan (controlling).

Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara :

- i. Membandingkan realisasai dengan rencana (anggaran)
- ii. Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu (bila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Sedangkan menurut Sasongko dan Parulian (2015 : 3) kelompok fungsi anggaran yaitu:

1. Perencanaan Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
2. Koordinasi Anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian - bagian di dalam perusahaan.
3. Motivasi Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
4. Pengendalian Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan.

2.1.3.4 Unsur – Unsur Anggaran

Menurut Munandar (2021), suatu anggaran mempunyai empat unsur yaitu:

1. Rencana, merupakan suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Anggaran juga merupakan suatu rencana, karena anggaran merupakan penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang.

Hanya saja anggaran merupakan suatu rencana yang mempunyai spesifikasi-spesifikasi khusus, seperti misalnya disusun secara sistematis, mencakup seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit moneter.

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Mengingat bahwa anggaran adalah suatu rencana yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja, maka sudah semestinya bahwa anggaran harus mencakup seluruh kegiatan perusahaan.
3. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. Adapun unit moneter yang berlaku di Indonesia ialah unit “Rupiah”. Unit moneter ini sangat diperlukan, mengingat bahwa masing-masing kegiatan perusahaan yang beraneka ragam tersebut sering mempunyai kesatuan unit yang berbeda-beda, seperti kilogram, meter, meter persegi, liter dan sebagainya. Dengan unit moneter dapat diseragamkan semua kesatuan yang berbeda tersebut, sehingga memungkinkan untuk dijumlahkan, diperbandingkan serta dianalisa lebih lanjut.
4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa anggaran berlakunya untuk masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apa yang dimuat didalam anggaran adalah taksiran-taksiran tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.

2.1.3.5 Proses Pembuatan Anggaran

Penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dengan beberapa segmen pembagian kerja. Hal ini tergantung dari kebijakan dan ketetapan perusahaan yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran pemerintah.

Menurut Harahap (2012 : 20), metode yang dapat dipergunakan dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

1. *Otoriter* atau *Top Down* Dalam metode ini anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan dan anggaran ini dilaksanakan oleh bawahan tanpa adanya keterlibatan bawahan dan penyusunannya. Metode ini ada baiknya digunakan bila karyawan tidak mampu menyusun anggaran atau dianggap terlalu lama dan tidak tepat jika diserahkan kepada bawahannya. Hal ini bisa terjadi dalam perusahaan yang karyawannya tidak memiliki cukup keahlian
2. Untuk menyusun anggaran. Atasan bisa saja menggunakan jasa konsultan atau tim khusus untuk melaksanakan.
3. *Demokrasi* atau *Bottom Up* Dalam metode ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan pemerintah. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai atasan. dimana diserahkan sepenuhnya menyusun anggaran yang ditargetkan pada masa yang akan datang. Metode ini digunakan jika karyawan sudah memiliki kemampuan dalam menyusun anggaran dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan proses yang lama dan berlarut.

4. Campuran antara *Top Down* dan *Bottom Up* Metode terakhir ini merupakan campuran dari kedua metode diatas, penyusunan anggaran dimulai dari atas dan selanjutnya diserahkan untuk dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. Jadi pedoman dari atasan atau pimpinan dan kemudian dijabarkan oleh bawahan sesuai dengan arahan dari atasan.

2.1.3.6 Langkah-langkah Menyusun Anggaran

Menurut Nafarin (2013 : 9), proses penyusunan anggaran dibagi kedalam beberapa tahapan antara lain:

1. Penentuan pedoman anggaran yang dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Dengan demikian anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran.
2. Tahap penentuan anggaran Pada tahap ini, semua manajer dan direksi mengadakan rapat meliputi kegiatan:
 - 1) Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran.
 - 2) Mengoordinasikan dan menelaah komponen anggaran
 - 3) Pengesahan dan pendistribusian anggaran
3. Pelaksanaan anggaran Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. setelah dianalisis kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi.

2.1.3.7 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan semua aktifitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut. Tercapainya realisasi atas anggaran dalam Kementerian/ Lembaga merupakan hal yang penting diketahui oleh masyarakat saat ini karena masyarakat dapat menilai langsung kinerja dari lembaga pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggarannya. Untuk mengetahui kinerja dan ketaatan terhadap penggunaan APBN/APBD, Kementerian/Lembaga wajib menyusun laporan keuangan atas bagian anggarannya yang dinekal dengan Laporan Realisasi Anggaran. (Utomo, 2020)

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai

realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. (Ratmono dan Sholihin, 2017: 25)

2.1.3.8 Periode Laporan Realisasi Anggaran

Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, PSAP 03 mengenai laporan realisasi anggaran paragraf 10, periode pelaporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dalam laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, estimasi mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan realisasi anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2.1.3.9 Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010) tentang standar akuntansi pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas pengguna anggaran.

2.1.4 Kinerja Anggaran Belanja

Kinerja Anggaran Belanja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau strategi, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Mahmudi (2019: 155) menyatakan berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja, antara lain berupa:

1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran dengan realisasinya yang bisa dinyatakan

dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanja di kategorikan menjadi dua jenis yaitu selisih disukai (*favourable variance*) dan selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut *favourable variance*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka di kategorikan *unfavourable variance*.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu naik, alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, pertumbuhan kurs rupiah, pertumbuhan jumlah cakup layanan, dan penyesuaian faktor-faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus di ikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja berupa:

1) Analisis Belanja per Fungsi Total Belanja

Analisis belanja per fungsi terhadap total belanja di hitung dengan cara membandingkan belanja tiap-tiap fungsi terhadap total belanja dalam APBN.

2) Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja yang di alokasikan untuk belanja operasi dengan total belanja. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis di konsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang-ulang.

3) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang.

2.2 Tinjauan Empirik

Pada penelitian ini calon peneliti mencantumkan beberapa karya ilmiah terdahulu, yang menurut calon peneliti memiliki relevansi dengan penelitian yang calon peneliti usulkan. Beberapa karya ilmiah ini dipilih dari institusi pendidikan yang sama dengan institusi pendidikan calon peneliti. Hal ini dengan

pertimbangan efisiensi dan menjaga objektivitas peneliti sehingga terhindar dari spekulasi plagiat.

Berikut adalah beberapa penelitian yang sejenis yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu.

Tabel 2.1 Tinjauan Empirik

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Syamsuddin I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). <i>YUM E: Journal of Management</i> , 5(2), 170-177.	Analisis kinerja anggaran belanja pada komisi pemilihan umum provinsi Sulawesi barat tahun 2018-2020	Hasil penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan perbandingan anggaran dan realisasi belanja dapat diketahui bahwa terdapat selisih antara realisasi dan anggaran yang ada.	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan metode deskriptif.	Penelitian terdahulu berfokus pada penilaian kinerja karyawan sedangkan penelitian sekarang berfokus pada penilaian kinerja Komisi Pemilihan Umum.
2.	Olivia Devi Yulian P.O.(2021). <i>Jurnal ekonomi, Bisnis Dan Terapan (JESIT)</i> , 2(2), 207-226.	analisis kinerja anggaran belanja pada komisi pemilihan umum tanah toraja tahun 2017-2019.	Berdasarkan hasil penelitian kinerja keuangan belanja pada komisi pemilihan umum tanah toraja secara umum dapat dikatakan dengan baik, artinya realisasi	Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama berfokus pada penelitian kinerja anggaran belanja.	Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dan penelitian sekarang menggunakan metode deskriptif

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Peneliti	Persamaan	Perbedaan
			belanja tidak melebihi anggaran yang diberikan.		
3.	Adila juita siska (2018) Jurnal ekonomi syariah <i>Journal of Economic Studies</i> , 2(1), 99-111.	Analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja pada komisi pemilihan umum periode 2011-2015.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penggunaan anggaran belanja pada komisi pemilihan umum kota payakumbuh dari tahun 2011 s.d 2015 dikatakan sangat efisien.	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menganalisis anggaran belanja.	Pada peneliti terdahulu berfokus pada tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja sedangkan peneliti sekarang hanya berfokus pada kinerja anggaran belanja.
4.	Rexy R I Palimbongan (2019). <i>Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi</i> , 7 (4).	Analisis kinerja anggaran belanja pada badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah kota tomohon.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja yang telah dilakukan lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan.	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menganalisis kinerja anggaran belanja.	Peneliti terdahulu berfokus pada pengelolaan keuangan pendapatan sedangkan peneliti sekarang berfokus pada kinerja anggaran belanja.
5.	Lia Hanifa (2021). <i>Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton</i> , 7(4), 640-651.	Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah provinsi sulawesi tenggara	Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan belanja dan keserasian belanja dikatakan baik dan serasi atau seimbang dalam	Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan metode deskriptif	Penelitian terdahulu berfokus pada penelitian pendapatan dan belanja daerah sedangkan peneliti sekarang berfokus pada

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Peneliti	Persamaan	Perbedaan
		tahun anggaran 2016-2020.	mengalokasikan belanja daerah.		kinerja anggaran belanja.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model (gambar) berupa konsep tentang hubungan antar variabel satu dengan berbagai faktor lainnya (Usman,2013:34). Berdasarkan ulasan dan konsep yang dijelaskan dalam tinjauan teori, maka peneliti mengajukan anggapan dasar atau kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada gambar dibawa.

Pada bagian gambar dibawah dijelaskan mengenai struktur atau konsep dalam penelitian yang akan dilakukan di KPU Kabupaten Pasangkayu dengan menganalisis laporan realisasi anggaran belanja dan analisis anggaran belanja tahun 2019-2021.



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Dalam menjalankan penelitian di KPU Kabupaten Pasangkayu, peneliti pertama kali melakukan pengumpulan data, sesuai dengan indikator variabel yang telah ditentukan pada penelitian ini, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Belanja. Untuk menganalisis variabel tersebut, peneliti menggunakan indikator Analisis Anggaran Belanja. Selanjutnya akan dikelola dengan metode deskriptif yang hasilnya akan kembali dianalisis berdasarkan instrumen peneliti yang telah ditetapkan dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu perealisasi anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu menunjukkan dimana realisasi belanja lebih kecil dari target anggaran belanja yang sudah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari realisasi belanja yang tidak melebihi anggaran belanja yaitu pada tahun 2019 nilai varians sebesar Rp. 129.789.238 atau sebesar 98,58% dari total pagu APBN, pada tahun 2020 nilai varians sebesar Rp. 2.635.138794 atau sebesar 90,20% dan pada tahun 2021 nilai varians sebesar Rp. 50.184.068 atau sebesar 98,98% dari total pagu APBN, walaupun dilihat dari segi keuangan yang mengalami penurunan penggunaan dalam memenuhi keperluan pembiayaan kegiatan yang dilakukan instansi tidak memuaskan.

Berdasarkan hasil analisis data kinerja anggaran belanja pada tahun 2019-2021 dapat dikatakan kurang efisiensi, dikarenakan persentase rata-rata yang berada pada 95,92%. Tetapi dengan belanja yang relatif kecil dibanding anggaran yang ditetapkan atau persentasenya tidak berada diatas 100%, ditambah lagi dengan penghematan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu sehingga mendapatkan SiLPA surplus yang nantinya dapat digunakan untuk biaya belanja lainnya dimasa yang akan datang.

5.2 Saran

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja secara khusus APBN. dengan kinerja yang baik maka efektivitas, produktivitas, dan efisiensi belanja juga akan semakin baik.
2. Dalam hal keserasian belanja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu perlu lebih meningkatkan belanja modal, karena belanja modal yang digunakan untuk aset-aset tetap akan berguna dalam jangka panjang yang akan memberikan manfaat pada masa yang akan datang.
3. Bagi peneliti selanjutnya kiranya untuk melakukan penelitian kinerja anggaran belanja dengan lebih rinci dan menjadikan penelitian ini sebagai acuan sehingga kekurangan dalam penelitian ini mendapat perbaikan kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Daling, Marchelino. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *jurnal EMBA Vol. 1 No.3*
- Halim Abdul Dan Mohammad Syam Kusufi. (2018). *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hanifa, L. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016-2020. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(4), 640-651.
- Halim, A. & Kusufi, M.S. (2018). *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- I Kadek Andika Setiawan. (2021). Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBD) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Ulang. *Jurnal Referensi Umum 2.1 (2021)*, 78-82.
- Julita. (2011). Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Dosen Universitas ,Uhammadyah Sumatera Utara*.
- Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2021). Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 2886-2899.
- Mahmudi, (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi 3)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohamad. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE : Yogyakarta.
- Mahmudi, (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Meliba Halawa Dan Ignatius Adiwidjaja. Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupateng Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 5.3 (2016)*.
- Mirawati, Y. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi): Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(3), 19-41.

- Muslih, M., Rahadi, D. R., & Marbun, S. O. (2019). Tata kelola pemerintahan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3(1).
- Maddatung, B, Syukur,A., & Karim 3rd, A. (2021) *The Role Of Bumdes In Sustanaible Ekonomi At Enrekang Regency. Indian jurnal of economics and bussiness*, 20(2).
- Nafain (2019). Evaluasi Prosedur Penyusunan Anggaran Dan Penetapan Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 1-6.
- Noch, M. Y., Bonsapia, M., Patiran, A., Tuhumury, H., & Pattiasina, V. (2021). Determinan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2(2), 225-239.
- Olivia Devi Yulian P,O.(2021). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Toraja. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Terapan (JESIT)* ,2(2), 207-226.
- Palimbongan, R. R. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(4).
- Pilat, J.J. (2017) Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2016. *Jurnal Accountability*, 46.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pratiwi, S. (2013). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Batas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Unkom*.
- Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 Penjelasan Pada Pasal 5 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Riza Candy Septiani (2018). Analisis Kinerja Anggaran KPU Kota Kediri Dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota Kediri Tahun 2013. *Artikel Simki-Ekonomik 02.03 (2018)*.
- Rizal, R., Fitri, S. A., & Rantika, D. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(1), 20-37.
- Ratmono, D., Dan Sholohin, M (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*l. UPP STIM YKPM : Yogyakarta.

- Sadarmayanti, (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : Refika Aditama.
- Siska, A. J., & Afriyanto, N. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Periode 2011-2015 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh). *Ekonomika Syariah: Journal Of Economic Studies*, 2(1), 99-111.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D Bandung*.: Alfabeta CV.
- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME: Journal Of Management*, 5(2), 170-177.
- Utomo . R Dan C Elbas (2020). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, *Jurnal Fakultas Ekonomi*, ISSN : 2252-8768. Volume 05 Nomor 02.
- Yoeyong Rahsel (2016), Pagaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Administrasi Pusat Universitas Padjadjaran Bandung (Studi Pada Bagian Administrasi Umum UNPAD). *Jurnal Manajemen Magister 2.2 (2016)*.